LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI S1 HUKUM KELUARGA ISLAM

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN

2026

A. Kriteria Audit

Kategori	No	Standar
AMI6 - Pendidikan	1	AMI 6 - Luaran Pendidikan
	2	AMI 6 - Masukan Pendidikan
AMI6 - Penelitian	3	AMI 6 - Luaran Penelitian
	4	AMI 6 - Proses Penelitian
	5	AMI 6 - Masukan Penelitian
AMI6 - Pengabdian Kepada Masyarakat	6	AMI 6 - Luaran PkM
	7	AMI 6 - Proses PkM
	8	AMI 6 - Masukan PkM
AMI6 - VMTS	9	AMI 6 - Visi
AMI 6 - Tata Kelola dan Tata Pamong	10	AMI 6 - Tata Kelola dan Tata Pamong
AMI6 - Kerjasama	11	AMI 6 - Kerjasama
AMI6 - Kemahasiswaan	12	AMI 6 - PMB
	13	AMI 6 - Layanan Akademik
	14	AMI 6 - Kinerja Akademik
	15	AMI 6 - Pengembangan Karir
AMI6 - Budaya Mutu	16	AMI 6 - Masukan Budaya Mutu
AMI6 - Pembelajaran Jarak Jauh	17	AMI - PJJ

B. Rincian Temuan dan upaya tindak lanjut

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
1	Mahasiswa prodi HKI belum difasilitasi untuk menyelesaikan studi secara fleksibel (tatap muka, daring, kombinasi, alur kurikulum fleksibel, dan RPL) sesuai regulasi yang berlaku	Koordinasi Dengan Warek Bidang Akdemik mengenai fasilitas studi secara fleksibel (tatap muka, daring, kombinasi, alur kurikulum fleksibel, dan RPL) sesuai regulasi yang berlaku	Prodi HKI melakukan koordinasi dengan wakil rektor akademik, dalam fasilitas untuk menyelesaikan studi secara fleksibel (tatap muka, daring, kombinasi, alur kurikulum fleksibel, dan RPL) sesuai regulasi yang berlaku
2	PT belum mempunyai kurikulum 2 semester per tahun dengan opsi semester antara sesuai pedoman akademik	Koordinasi dengan Warek Akademik mengenai kurikulum 2 semester per tahun dengan opsi semester antara	Prodi HKI berkoordinasi dengan PT untuk memasukkan sub bab kurikulum 2 semester per tahun dengan opsi semester antara pada pedoman akademik

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
3	Perguruan tinggi belum mempunyai pedoman pengelolaan pendidikan	Koordinasi dengan Warek Akademik mengenai pengelolaan kegiatan pendidikan dengan seluruh kegiatan direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan secara konsisten sesuai prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik	Perguruan tinggi melalui koordinasi fakultas/ PS menyusun dan mengesahkan pedoman pengelolaan pendidikan
4	Perguruan tinggi belum menyusun rencana strategis pendidikan yang selaras dengan misi dan visi, serta seluruh perencanaan tersedia, terdokumentasi, dan disahkan	Koordinasi dengan dekan fakultas sesuai acuan PT mengenai rencana strategis pendidikan yang selaras dengan misi dan visi, serta seluruh perencanaan tersedia, terdokumentasi, dan disahkan	Prodi HKI menyusun rencana strategis pendidikan yang selaras dengan misi dan visi, serta seluruh perencanaan tersedia, terdokumentasi, dan disahkan
5	Perguruan tinggi belum menerapkan kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan seluruh civitas akademika memahami hak dan tanggung jawab akademik	Koordinasi dengan PT (Warek) mengenai penerapan kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan seluruh civitas akademika memahami hak dan tanggung jawab akademik	Prodi HKI koordinasi dengan PT untuk menerapkan kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan seluruh civitas akademika memahami hak dan tanggung jawab akademik
6	Perguruan tinggi belum menyediakan layanan mahasiswa (administrasi akademik, bimbingan, kesehatan, dan kebutuhan khusus)	Koordinasi dengan Warek (PT) mengenai penyediaan layanan mahasiswa (administrasi akademik, bimbingan, kesehatan, dan kebutuhan khusus) sehingga seluruh mahasiswa aktif memperoleh layanan sesuai kebutuhan	Prodi berkoordinasi dnegan Perguruan tinggi menyediakan layanan mahasiswa (administrasi akademik, bimbingan, kesehatan, dan kebutuhan khusus)
7	Fakultas Syariah belum melakukan aktivasi website fakultas	Prodi HKI Koordinasi dengan PUSDATIN untuk Aktivasi Websaid	Prodi HKI Koordinasi dengan PUSDATIN untuk Aktivasi Website Fakultas/ PS
8	Perguruan tinggi belum memiliki dan menerapkan pedoman resmi masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu yang disosialisasikan kepada sivitas akademika	Dekan Fakultas Syariah koordinasi dengan PT (Warek Akademik) mengenai penerapan pedoman resmi masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu	Dekan fakultas bersama perguruan tinggi menyusun draft dan mengesahkan pedoman resmi masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu yang disosialisasikan kepada sivitas akademika
9	Prodi HKI dengan kualifikasi DTPS Pendidikan terakhir S3 status on going	Kaprodi Memotivasi agar DTPS yang malkukan studi s3 agar lulus tetpat waktu	Kaprodi Memotivasi agar DTPS yang malkukan studi s3 agar lulus tetpat waktu
10	Tugas mengajar dosen belum sesuai dengan bidang keahlian, kualifikasi akademik, pengalaman akademik, dan rekam jejak penelitian atau PkM	KAprodi melkakan koordinasi dengan dekan fakultas syaraiah agar tugas mengajar dosen DPR sudah sesuai dengan bidang keahlian, kualifikasi akademik, pengalaman akademik, dan rekam jejak penelitian atau PkM	Kaprodi melakukan koordinasi dengan dekan fakultas syariah agar tugas mengajar dosen DPR sudah sesuai dengan bidang keahlian, kualifikasi akademik, pengalaman akademik, dan rekam jejak penelitian atau PkM

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
11	Prodi HKI belum mempunyai DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	kaprodi dan dekan syariah mendorong DTPS yang sudah sesuai kualifikasi agar mengajukan jabfung Lektor Kepala	Kaprodi dan dekan syariah mendorong DTPS yang sudah sesuai kualifikasi agar mengajukan jabfung Lektor Kepala
12	Prodi HKI belum mempunyai SK Fakultas mengenai sarpras laboratorium yang mendukung proses pembelajaran praktek	Prodi HKI Koordinasi dnegan Dekan Fakutas Syariah mengenai pengadaan dan inventarisasi sarpras laboratorium yang mendukung proses pembelajaran praktek	Prodi HKI membuat pedoman dan SK pengesahan tertanda fakultas untuk laboratorium semu
13	Prodi HKI belum mempunyai arsip pedoman K3	Kaprodi melakukan koordinasi dengan warek II tentang pedoman K3	Kaprodi melakukan koordinasi dengan warek II
14	Prodi HKI belum melakukan proses evaluasi terkait dengan penggunaan sarpras meliputi Evaluasi mencakup (1) identifikasi kelebihan & kelemahan, (2) berbasis parameter kuantitatif/kualitatif, (3) komprehensif berbasis kondisi nyata, (4) terdokumentasi sahih. Tindak Lanjut mencakup (1) berbasis hasil evaluasi, (2) dirumuskan spesifik, terukur, realistis, berbasis waktu, (3) dimonitor implementasinya, (4) didukung bukti sahih. Evaluasi dan tindak lanjut wajib memenuhi seluruh aspek	Kaprodi HKI melakukan moordinasi dengan dekan fakultas syariah mengenai evaluasi penggunaan sarpras	Kaprodi HKI melakukan koordinasi dengan dekan fakultas syariah
15	Penelitian DTPS yang didanai oleh sumber luar negeri (RI), dalam negeri (RN), dan PT/mandiri (RL) dibandingkan dengan jumlah seluruh DTPS	Prodi Melakukan rekap data DTPS yang melakukan penelitian dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri	Prodi Melakukan rekap data DTPS yang melakukan penelitian dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri
16	Program Studi belum memiliki luaran penelitian berupa HKI (Paten/Paten Sederhana)	kaprodi melakukan koordinasi dnegan DTPS Agar mempunyai paten karya	Kaprodi melakukan koordinasi dan penjadwalan dengan DTPS agar mempunyai paten karya
17	UPPS belum menerapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas penelitian	KAprodi melakukan koordinasi dengan dekan agar UPPS menerapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas penelitian	Kaprodi melakukan koordinasi dengan dekan agar UPPS menerapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas penelitian
18	Rekap proporsi PkM DTPS yang didanai oleh sumber luar negeri (RI), dalam negeri (RN), dan PT/mandiri (RL) dibandingkan dengan jumlah seluruh DTPS	Kaprodi kordinasi dengan DTPS agar melakasanakan Pkm dibuktikan dengan laporan dan rekap kegiatan untuk data PS	Kaprodi kordinasi dengan DTPS dan melakukan penjadwalan mengenai kegiatan Pkm

No	Temuan	Upaya Tindak Lanjut Auditee	Konfirmasi Tindak Lanjut (Ya/Tidak) disertai bukti
19	UPPS belum menerapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas PkM	Kaprodi melkaukan koordinasi dengan DTPS agar menerapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas PkM	UPPS membuat dan menerapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas PkM
20	PS belum melakukan evaluasi dan tidnaklanjut mengenai visi keilmuan	PS melakukan evaluasi dan tindaklanjut mengenai visi keilmuan	PS melakukan evaluasi dan tindaklanjut mengenai visi keilmuan
21	UPPS belum menjalankan proses tatakelola dengan siklus PPEPP, dengan dibuktikan RKAT 2025	UPPS melalui Prodi menjalankan proses tatakelola dengan siklus PPEPP	UPPS melalui Prosi menjalankan proses tatakelola dengan siklus PPEPP
22	UPPS/PS belum menyediakan layanan akademik yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran mahasiswa, yang mencakup pembimbingan akademik, konseling belajar, bimbingan tugas akhir, dan layanan administrasi akademik secara efektif, efisien, dan responsive	PS kordinasi dengan PT agar menyediakan layanan akademik yang profesional	PS kordinasi dengan PT agar menyediakan layanan akademik yang profesional
23	Prodi HKI belum ada data rasio dosen dan mahasiswa	Prodi HKI melakukan pendataan rasio dosen dan mahasiswa	Prodi HKI melakukan pendataan rasio dosen dan mahasiswa dengan penetapan daya tampung
24	UPPS/PS belum menyelenggarakan program pengembangan karier mahasiswa yang dirancang dan diimplementasikan secara sistematis dan berkelanjutan	PS menyelenggarakan program pengembangan karier mahasiswa yang dirancang dan diimplementasikan secara sistematis dan berkelanjutan	PS menyelenggarakan program pengembangan karier mahasiswa yang dirancang dan diimplementasikan secara sistematis dan berkelanjutan
25	UPSS belum melakukan 5 prinsip kegiatan PJJ yang dilakukan dan berhasil dengan baik	Dekan syariah berkoordinasi dengan PT Agar membuawat pedoman dan melakukan 5 prinsip kegiatan PJJ yang dilakukan dan berhasil dengan baik	Dekan syariah berkoordinasi dengan PT Agar membuawat pedoman dan melakukan 5 prinsip kegiatan PJJ yang dilakukan dan berhasil dengan baik
26	Perguruan tinggi belum mampu menyediakan tutor sesuai dengan kebutuhan	kaprodi HKI koordinasi dengan dekan syariah agar menyediakan tutor sesuai dengan kebutuhan	Kaprodi HKI koordinasi dengan dekan syariah agar menyediakan tutor sesuai dengan kebutuhan

C. Kesimpulan dan Hasil Audit Mutu Internal

Skor Hasil AMI (%)	Skor Hasil Temuan (%)	Skor Observasi (%)	Skor Minor (%)	Skor Mayor (%)
65.79%	34.21%	0%	28.95%	5.26%

Tuban, 11 September 2026

Pimpinan Auditie,

(Rinwanto, S.Sy, M.H)

Tuban, 11 September 2026

Ketua Auditor,

(Irfa'i Alfian Mubaidilla, M.Pd.)

Tuban, 11 September 2026

Kapus Audit,

(Irfa'i Alfian Mubaidilla, M.Pd.)